

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Malik Gismar dan Syarif Hidayat, 2010, *Reformasi Setengah Matang*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Abdul Aziz Hakim, 2006, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Aziz Hakim, 2006, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, pusat Studi Hukum : Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Bowman dan Hampton, 1983, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cholid Narbuko, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Didik Sukrisno, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi* „Malang” setara Press.
- David Held, *Models Of Democracy* , Jakarta, 2007.
- Gamawan Fauzi, 2012, *Sengketa Pemilu, Putusan MK dan Pelaksanaan Putusan MK dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Pres.
- H.M Busrizalti, 2012, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya* : Yogyakarta: Toral Media.
- Josef Riwu Kaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah dan Negara Republik Indonesia*: Rajawali Pres.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Pusat Bahasa.
- Raharjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 2011 *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Syaukani dkk, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Ilmu
- Marbun B., 2005 *Otonomi Daerah 1945-2005, Proses dan Realita Perkembangan Otda Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat ini*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'ud Said, 2005, *Arah Otonomi Daerah di Indonesia* .UMM prees.
- Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstusionalisme Indonesia*, Indpth Publishing Bandar Lampung.
- James Manor, 1999, *The Political Economoy Of Democratic Desentralization*, The World Bank Washington D.D

Peraturan Undang – Undang

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 53/ Permen KP/2016.
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara
- Peraturan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Jurnal

- Pratiwi Putri Utami, Indarja, Untung Dwi Hananto, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Di Desa Klaking Kecamatan Jekulo Kudus, *Jurnal Diponegoro Law*, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017.

Surya Adi Mufid, Indarja, Untung Dwi Hananto, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Salatiga, Jurnal Diponegoro, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2017.

Okta Pradita Kusuma Putra, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinsa Kelautan dan Perikanan Dalam Penggolongan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati.